



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Kawasan Banjar Bakula provinsi Kalimantan Selatan

Akhmad Syaukani¹, Mukhlis Khariry², Cici Asmawati^{3*}

^{1, 2, 3*}STIA Bina Banua Banjarmasin, Indonesia

Corresponding Author: Cici Asmawati cici.asmawati@stibinabanuabjm.ac.id

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the influence of Regional Original Income and Balancing Funds on the Financial Performance of Regency and City Governments in the Banjar Bakula Area, South Kalimantan Province. The method used in this analysis is quantitative, the analysis tool in this research uses SmartPLS 3.0. This software can analyze SEM models based on variance or better known as Partial Least Square. SEM model analysis with SmartPLS can identify and estimate relationships between latent (predicted) variables. This research has a complex model and a limited number of samples, so data analysis uses SmartPLS software. SmartPLS uses a bootstrapping or random doubling method. Where the PLS-SEM analysis consists of two sub models, namely the measurement model (measurement model) or external model and the structural model (structural model) or internal model. The results of this research show that local revenue has a positive and significant effect on the financial performance of Regency and City Regional Governments in the Banjar Bakula Area, South Kalimantan Province, with a P-value of $0.000 < 0.05$, while the Balancing Fund has a negative but not significant effect on the financial performance of the Government. Regions and Cities in the Banjar Bakula Area, South Kalimantan Province, with a P-value of $0.386 > 0.05$.

Keywords: Regional Original Income; Balancing Funds; Financial Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam analisis ini yaitu kuantitatif, alat analisis dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS 3.0. Perangkat lunak ini dapat menganalisis model SEM berdasarkan varian atau lebih dikenal dengan Partial Least Square. Model analisis SEM dengan SmartPLS dapat mengidentifikasi dan mengestimasi hubungan antar variabel laten (prediksi), penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan software SmartPLS. SmartPLS menggunakan metode *bootstrapping* atau penggandaan secara acak. Di mana analisis PLS-SEM terdiri dari dua sub model yaitu model pengukuran (*measurement model*) atau *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau *inner model*. Hasil penelitian ini menunjukkan Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan, dengan P-value $0,000 < 0,05$ sedangkan Dana Perimbangan berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan, dengan P-value $0,386 > 0,05$.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah; Dana Pertimbangan; Kinerja Keuangan

A. PENDAHULUAN

Menurut Kuncoro (2016: 169) pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat di atur sebagai berikut: (1) Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN; (2) Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD; (3) Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan.

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah Kabupaten/Kota, di samping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari Pemerintah Provinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana dari provinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN. Ada beberapa hal yang dianggap menjadi penyebab utama rendahnya PAD di Kabupatendan Kota di Kawasan BanjarBakula Provinsi Kalimantan Selatansehingga menyebabkan tingginya ketergantungan daerah terhadap pusat, yaitu: (1) Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah; (2) Tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan, karena semua jenis pajak utama yang paling produktif baik pajak langsung maupun tidak langsung ditarik oleh pusat; (3) Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan; (4) Alasan politis dimana banyak orang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme; (5) Kelemahan dalam pemberian subsidi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang hanya memberikan kewenangan yang lebih kecil kepada Pemerintah Daerah merencanakan pembangunan di daerahnya.

Seiring dengan besarnya tuntutan kepada daerah untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, maka salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah mengoptimalkan peran PAD di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana peran PAD dan Dana Perimbangan, mampu meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan dalam meningkatkan pendapatan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan target atau anggaran pendapatan daerah yang akurat. Untuk jelasnya target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari data Target, Realisasi dan ketercapaian tertinggi dan terendah PAD Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan. Target tertinggi PAD yaitu pada Kabupaten Banjar tahun 2020 dan target terendah PAD yaitu pada Kota Banjarbaru pada tahun 2022, sedangkan realisasi tertinggi PAD yaitu pada Kabupaten Banjar tahun 2022 dan realisasi terendah PAD yaitu pada Kota Banjarbaru tahun 2021, dan untuk persentase ketercapaian PAD tertinggi yaitu pada Kabupaten Banjar pada tahun 2022 dan persentase ketercapaian PAD terendah yaitu pada Kabupaten Tanah Laut tahun 2022.

B. LITERATURE REVIEW

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Secara sederhana, kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Apabila pencapaian melebihi target, maka kinerja dikatakan sangat baik, sedangkan apabila lebih rendah dari target maka dapat dikatakan bahwa kinerjanya buruk. Menurut Bastian (2016:329) kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwakinerja sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang pegawai, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan)

Menurut Halim (2017:208) kinerja keuangan merupakan kemampuan organisasi/perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Fahmi (2018:142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah

melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.

Isna dan Ayu (2015:78) kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintah dituntut untuk mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik agar dapat memperhatikan efektivitas, efesiensi dan ekonomis. Menurut Syamsi (2016:54).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Ibnu Syamsi, 1986: 199).

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2017:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh terhadap kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Menurut Dasire (2016: 38) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali

pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dasire, 2016: 43). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim (2017: 96-98), kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan dan kekayaan daerah dan lain-lain.

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana Perimbangan secara rata-rata di daerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah.

Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.

Inter governmental revenue adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Intergovernmental revenue biasa dikenal dengan Dana Perimbangan. Dana Perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah. Salah satu tujuan pemberian Dana Perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang

tertinggal serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi

C. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini menggunakan jenis penelitian korelasional. Jenis korelasional dipakai untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat (Kuncoro, 2017:16). Hubungan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, sebagai variabel independen mempengaruhi Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan fokus laporan keuangan yang digunakan adalah APBD tahun anggaran 2013-2022 Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti dalam pengambilan sampel adalah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan yang mempublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) atau APBD tahun anggaran 2013-2022. Objek yang dijadikan Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan, yang terdiri dari dua kota dan tiga Kabupaten, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square* (PLS). PLS merupakan model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan pendekatan berdasarkan variance atau *component based structural equation modeling*. Menurut Ghozali & Latan (2015), tujuan PLS-SEM adalah untuk mengembangkan teori atau membangun teori (orientasi prediksi). PLS digunakan untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antar variabel laten (*prediction*). PLS merupakan metode analisis yang powerfull oleh karena tidak mengasumsikan data arus dengan pengukuran skala tertentu, jumlah sample kecil (Ghozali, 2011).

Penelitian ini memiliki model yang kompleks serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dalam analisis data menggunakan *software SmartPLS*. *SmartPLS* menggunakan metode *bootstrapping* atau penggandaan secara acak. Oleh karenanya asumsi normalitas tidak akan

menjadi masalah. Selain itu, dengan dilakukannya *bootstrapping* maka *SmartPLS* tidak mensyaratkan jumlah minimum sampel, sehingga dapat diterapkan untuk penelitian dengan jumlah sampel kecil.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Hipotesis Secara Parsial

Pengujian hipotesis secara parsial pada model struktural (*inner model*) dapat dilihat dari nilai koefisien jalur (*path coefficient*); nilai *T*-statistik dan nilai *P-value*. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada uraian berikut ini.

Koefisien Jalur (Path Coefficients)

Koefisien jalur (*path coefficient*) merupakan nilai yang menunjukkan arah hubungan variabel apakah arah hubungan antarvariabel konstruk positif atau negatif. Nilai koefisien jalur (*path coefficient*) dapat dilihat pada Tabel 1:

Tabel 1 Nilai Koefisien Jalur (*path Coefficient*)

Konstruk	Kinerja Keuangan
Pendapatan Asli Daerah	0,747
Dana Perimbangan	-0,089

Sumber: Data Primer *SmartPLS 3.0*, diolah tahun 2023

Berdasarkan Tabel diatas, nilai koefisien jalur tiap konstruk berada diantara rentang nilai -1 sampai 1, artinya pendapatan asli daerah (X1) memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan (Y), sedangkan dana perimbangan (X2) memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan (Y).

T - Statistic

T-statistic merupakan nilai yang menunjukkan tingkat signifikansi dan besarnya pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Nilai *T-statistic* ini diperoleh dari prosedur *bootstrapping* (*resampling method*). Hipotesis dapat diterima apabila nilai *T-statistic* > 2,008 (tingkat signifikansi 5%) untuk hipotesis dua ekor (*two tailed*) dan *P-value* < 0,05 (tingkat signifikansi 5%) dari prosedur. Hasil evaluasi *Estimate For Path Coefficients* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Hasil *Estimate for Path Coefficients*

Konstruk				Original Sample	T-Statistic	P-Value
Pendapatan	Asli	Daerah	(X1)=>	0,747	7,723	0,000

Kinerja Keuangan (Y)				
Dana Perimbangan	(X2)=> Kinerja Keuangan (Y)	-0,089	0,868	0,386

Sumber: Data Primer *SmartPLS 3.0*, Diolah Tahun 2023

Dari Tabel diketahui nilai koefisien jalur (beta) konstruk pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, dimana pada pengaruh langsung nilai koefisien jalur (beta) sebesar 0,747, artinya bila pendapatan asli daerah meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.747. Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh langsung pada konstruk pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dengan T-statistik lebih besar dari T-tabel sebesar $7,723 > 3,182$; P-value sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Nilai koefisien jalur (beta) konstruk dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, dimana pada pengaruh langsung nilai koefisien jalur (beta) sebesar -0,089, artinya bila dana perimbangan meningkat akan berpengaruh terhadap penurunan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar -0.089. Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh langsung pada konstruk dana perimbangan terhadap kinerja keuangan dengan T-statistik lebih kecil dari T-tabel sebesar $3,182 < 0,868$; P-value sebesar $0,386 > 0,05$ yang menunjukkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai koefisien jalur (beta) konstruk pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, dimana pada pengaruh langsung nilai koefisien jalur (beta) sebesar 0,747, artinya bila pendapatan asli daerah meningkat akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.747. Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh langsung pada konstruk pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan dengan T-statistik lebih besar dari T-tabel sebesar $7,723 > 3,182$; P-value sebesar $0,000 < 0,05$ yang menunjukkan pendapatan asli daerah berpengaruh

positif dan signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (perda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2017:132) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karena itu kemampuan daerah menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Kontribusi pendapatan asli daerah yang semakin besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan berpengaruh terhadap kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Pemberlakuan undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 membawa implikasi baru bagi perkembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dampak yang paling dirasakan oleh Pemerintah Daerah adalah diberikannya kewenangan yang begitu luas. Hal inilah yang diartikan sebagai pemberian otonomi kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Pada intinya pemberian otonomi diberikan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kondisi yang berkembang di wilayahnya. Namun demikian implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah bahwa daerah dituntut kemandiriannya dalam berbagai bidang.

Kemandirian daerah harus didukung oleh kemampuan yang dimiliki, khususnya dalam hal pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, oleh karena itu setiap daerah harus mampu berperan aktif dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan yang dikuasainya, dan terutama yang berasal dari PAD. Idealnya adalah bahwa PAD dapat menjadi sumber utama bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara itu sumber-sumber pendanaan/ penerimaan daerah lainnya, seperti Dana Perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain PAD yang sah hanya bersifat sebagai pemacu bagi pelaksanaan pembangunan.

Pendapatan asli daerah dapat memberikan kontribusi pertumbuhan pendapatan daerah. Jika pendapatan daerah mengalami peningkatan maka terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah untuk

membiayai kegiatandaerahnya sehingga memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah telah memiliki kinerja yang baik. Pemerintah daerah dapat menekan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan lain agar PAD meningkat setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. (MA Aftsani : 2017).

Adanya pengaruh positif pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan menandakan bahwa pendapatan asli daerah dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan daerah. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan mampu mengelola keuangan daerahnya dengan baik.

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan pendapatan suatu daerah dengan cara dipungut sesuai dengan peraturan daerah. Pendapatan asli daerah memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah sehingga pemerintah daerah mengurangi ketergantungannya pada pemerintah pusat. Apabila pertumbuhan pendapatan daerah semakin meningkat maka berdampak pada kenaikan kinerja keuangan pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2018) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan asli daerah mengakibatkan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan hasil penelitian Chrisnadwiheryanti, Wahidahwati, dan Bambang Suryono (2019) Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, Putri Puspita Ayu (2018) Studi Kasus Pemda Se-Jawa Barat dan Budianto dan Stanly W Alexander (2016) Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan (X₂) terhadap Kinerja keuangan (Y)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Nilai koefisien jalur (beta) konstruk dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, dimana pada pengaruh langsung nilai koefisien jalur (beta) sebesar -0,089, artinya bila dana perimbangan meningkat akan berpengaruh negatif terhadap peningkatan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 0.089. Dilihat dari nilai signifikansi pengaruh langsung pada konstruk Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan dengan T-statistik lebih kecil dari T-tabel sebesar $0,868 < 3,182$; P-value sebesar $0,386 > 0,05$ yang menunjukkan dana perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai pembangunan, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah. Dana Perimbangan secara rata-rata di daerah lain di Indonesia terhitung sebesar 80 persen dari penerimaan daerah (Andirfa et al, 2016). Apabila realisasi belanja daerah lebih tinggi daripada pendapatan daerah maka akan terjadinya defisit. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan belanja daerah maka pemerintah pusat mentransfer dana dalam bentuk Dana Perimbangan kepada pemerintah daerah. Semakin besar transfer Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah tergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan daerah menurun.

Dengan Dana Perimbangan Pemerintah Pusat mengharapkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengandalkan dana dari Pemerintah Pusat. Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis Sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis dana perimbangan saling mengisi dan melengkapi. Di beberapa daerah peran DAU sangat signifikan karena kebijakan belanja daerah lebih didominasi oleh jumlah DAU dari pada PAD (Sidik et al, 2002).

Pengaruh dana perimbangan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan bernilai negatif.

Pada intinya alokasi anggaran memiliki peran penting dalam penanganan masalah dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwasih (2018) Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang mengungkapkan bahwa peningkatan dana perimbangan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu pula dengan hasil penelitian Mulia Andirfa, Hasan Basri dan M.Shabri A.Majid (2016) Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Budianto dan Stanly W Alexander (2016) Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

E. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: (1) Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan; (2) Dana Perimbangan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Kawasan Banjar Bakula Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2016. *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Erlangga.
- Budianto, Stanly W Alexander. 2016. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado*. Vol. 4 No. 4 Desember 2016.
- Chrisna dwi heryanti, Wahidahwati, Bambang Suryono, 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. e-ISSN: 2460-0585
- Davey, Kenneth. 2016. *Finance, Public Intergovernmental fiscal relations Local Finance*. Jakarta : UI-Press
- Dwiyanto , Agus. 2003. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

- Erly Suandy, 2016 Edisi 6. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Fahmi, Irham 2018. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung. Alfabetha
- Halim, Abdul. 2017 *Akuntansi Keuangan Daerah* . Jakarta: Salemba Empat.
- Isna , Ardila, dan Ayu, Anindya, Putri. 2015. Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol 15, No. 1/ Maret 2015
- Kuncoro, Mudrajad, 2016, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Fokusmedia, Jakarta.
- Mardiasmo. 2015. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andhi
- Mulia Andirfa, Hasan Basri, M.Shabri A. Majid, 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*. Vol 5, No.3, Agustus 2016.
- Ni Kadek Novia Indrawati Putri, Ni Putu Ayu Darmayanti. 2019. Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud)*. Bali, Indonesia, Vol. 8, No. 5, 2019 : 2834-2861.
- Purnomo, Budi S. 2016. *Obligasi Daerah*. Bandung . Alfabetha
- Syamsi, Ibnu 2016. *Pengambilan keputusan dan sistem informasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Taras, Tyasani dan Luh Gede Sri Artini.2017. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali*. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol.6, No.5,2017 :2360-2387. *Universitas Udayana Bali*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, *Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2000, *Tentang Pajak Daerah*.
- Purwasih.2018 : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Universitas PGRI*. Yogyakarta.
- Putri Puspita Ayu, 2018. Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Kuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi FE. UN PGRI Kediri*. Vol. 3 No.1, Maret 2018.